

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak daerah di Indonesia, kebobrokan ekonomi dan penderitaan yang luas dalam bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang, mendorong banyak kelompok masyarakat, terutama dipedalaman Jawa, kesuatu titik tanpa merasa takut kehilangan sesuatu dimana mereka ikhlas mendukung suatu revolusi, yang bukan hanya ditujukan untuk menentang kembalinya Belanda, melainkan juga menentang seluruh tatanan sosial Indonesia yang dipakai Belanda untuk memerintah dahulu. Di kota maupun dipedalaman muncul tuntutan agar semua bekas kaki tangan Belanda atau Jepang digeser saja. Dan sasarannya bukan hanya pejabat Indonesia dan para pemimpin tradisional yang sudah pernah mengabdikan kepada penguasa kolonial, melainkan juga orang-orang Cina dan Indo, yang secara ekonomis sering menikmati keuntungan dari penguasa kolonial tersebut (Kahin, 1989: 16).

Selama masa kependudukan Jepang, Karesidenan Pekalongan sangat terpuruk oleh kebijakan ekonomi masa perang. Penguasa Jepang minta disediakan sampai separuh hasil panen padi di beberapa kawasan di Karesidenan Pekalongan untuk memberi makan Tentara Jepang Divisi ke-16 yang berkedudukan di Jawa, warga sipil Jepang, dan berbagai kelompok semi militer, serta menyediakan ransum bagi romusha yang bekerja di proyek-proyek di dalam maupun diluar karesidenan.

Dalam melaksanakan rencana wajib setor dan penjatahan beras, begitu pula soal perekrutan tenaga kerja paksa, penguasa Jepang mengandalkan pada kerjasamanya dengan elite birokrasi, yang secara sukarela atau pun secara terpaksa, berperan sebagai pengawas ekonomi bagi pemerintahan Jepang ditingkat lokal. Para pejabat ditingkat kecamatan yang istrinya mengawasi pembagian bahan sandang, acap kali memanfaatkan kesempatan ini untuk berkorupsi. Menjelang akhir masa pendudukan petani kebanyakan tidak punya cukup kain kafan untuk membungkus jenazah, namun mereka tahu bahwa para pejabat yang korup itu menimbun kain yang berharga itu. Penguasa Jepang memaksa para Kepala Desa berperan sebagai tuan tanah, mengumpulkan padi secara paksa dari para petani untuk memenuhi jatah setoran yang telah ditetapkan untuk tingkat kabupaten; dan mereka pun harus membantu kecamatan memenuhi jatah tenaga kerja paksanya. Lebih-lebih lagi, karena musim hujan terlambat datang dan musim kemarau berkepanjangan, maka paceklik pun melanda Karesidenan Pekalongan menjelang akhir tahun 1944; orang-orang dilaporkan terpaksa memakan bekicot, bonggol pisang, dan tanaman hutan, bahkan tak sedikit yang mati kelaparan ditengah jalan.

Selama dasawarsa akhir kekuasaannya, Belanda menjauhi golongan Islam dan mengganggu golongan nasionalis. Sebaliknya Jepang berusaha menggunakan baik para tokoh agama dan nasionalis maupun elite birokrasi. Para pemimpin agama dan nasionalis menduduki jabatan penting dalam badan-badan bentukan Jepang seperti Putera (Pusat Tenaga Rakyat), Barisan Pelopor, dan Dewan Penasihat Karesidenan. Kendati begitu, pangreh praja tetap memonopoli birokrasi

dan pangkat rendah dalam Peta. Menjelang akhir pendudukan Jepang, Agustus 1945, hubungan tradisional patron-klien antara birokrasi dan petani telah rusak, jika tidak hendak dikatakan telah hancur sama sekali. Sedangkan jurang sosio-ekonomis antara keleompok tersebut telah makin melebar. Pendapat yang menguasai kalangan kelas-kelas bawahan dalam tahun 1945 ialah, bahwa mereka telah dieksploitatif oleh elite birokrasi; dengan adanya pendapat itu lahirlah pendirian “mereka akan membalas hal itu dikemudian hari” (Kahin, 1986: 33).

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Tegal dalam suasana panas. Rakyat tegal kepada pemerintah Jepang yang terkenal kejam dan tidak berperikemanusiaan, mulai melawan. Rakyat Tegal sakit hati karena perilaku orang Jepang, mereka melakukan persiapan perlawanan dan tinggal menunggu siapa yang akan memimpin.

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara dan Bangsa Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta. Rakyat di daerah Tegal pada umumnya masih diliputi rasa keraguan, benarkah Indonesia telah merdeka? Kesangsian itu timbul karena sistem komunikasi pada waktu itu belum sempurna dan pihak penguasa Jepang selalu merahasiakan kejadian yang sebenarnya. Sikap keraguan rakyat di daerah Tegal menjadi lenyap setelah berita-berita tentang kemerdekaan dari Jakarta semakin santer dan ramai dibicarakan oleh para pemuda di kota Tegal yang disusul kemudian sekitar tanggal 19-20 Agustus 1945 prajurit-prajurit PETA dan HEIHO saling berdatangan kembali kerumah masing-masing karena telah dibubarkan oleh penguasa Jepang (Achmad, 1986: 1).

Sejak dahulu daerah Tegal, Brebes dan Pemalang merupakan kesatuan daerah yang kuat, yang diperintahkan oleh suatu marga, ialah dari Wangsa Reksonegaraan. Keadaan Tegal yang demikian ditambah pula setelah kemerdekaan negara dan bangsa diproklamasikan dan hilangnya kekuasaan Jepang sehingga seolah-olah ada kevakuman kekuasaan, dan juga rakyat Tegal yang masih panas akibat bara Perang Dunia II serta dendam terhadap Jepang yang sangat kejam itu. Sehingga tidak mengherankan bagi orang yang tahu akan hal ini dapat digunakan sebagai suatu alat menggerakkan rakyat untuk mencapai suatu tujuan.

Kesempatan yang demikian tidak dilewatkan oleh golongan komunis untuk melakukan petualangan politiknya dengan menyebarkan isu-isu dan menghasut rakyat guna kepentingan golongan sendiri. Dengan hasutan-hasutan politik yang dilakukan oleh golongan komunis, menimbulkan rasa benci dan dendam terutama ditunjukkan kepada pamong praja dan kepolisian negara bekas tinggalan pemerintah penjajahan Jepang (Yono, 2008: 72).

Pada awal bulan November 1945, terjadilah Gerakan Rakyat yang terkenal dengan sebutan, Peristiwa Tiga Daerah. Gerakan rakyat tersebut berpusat di daerah kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan sebagai algojonya seorang yang bernama Sakyani alias Kutil, pekerjaannya sebagai tukang cukur. Sakyani alias Kutil sejak jaman Jepang telah dididik/diasuh serta diberi pengertian-pengertian tentang paham politik oleh seorang bernama Partosutikno, pekerjaan Jawatan Pegadaian Pesayangan Talang. Partosutikno adalah seorang tokoh komunis yang selalu merahasiakan dirinya, perkenalan kedua orang tersebut semula sebagai langganan

cukur. Dibelakang Gerakan Rakyat Tiga Daerah adalah terdiri dari petualang-petualang politik berhaluan komunis, adapun Sakyani alias Kutil ia hanya satu-satunya orang yang dipandang cukup untuk memenuhi persyaratan untuk dijadikan pimpinan Gerakan/Algojo, disamping itu ia juga ditunjuk sebagai kepala polisi Gerakan Rakyat Tiga Daerah (Achmad, 1987: 17).

Tujuan dari gerakan ini adalah berusaha untuk menggantikan para pejabat pemerintahan daerah bekas peninggalan Jepang, dari mulai Lurah, Camat, Wedana, Bupati dan Residen dengan latar belakang untuk merebut kekuasaan pemerintahan RI yang sah, dengan jalan kekerasan menggunakan massa rakyat.

Sebagai awal perkembangan dimulai antara tanggal 20-25 Oktober 1945 dengan mengadakan latihan baris-berbaris setiap pagi dan sore, sebagai intinya diambilkan dari kalangan pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dimana Sakyani alias Kutil sebagai pemimpinnya.

Latihan-latihan tersebut diadakan dengan anjuran dalam rangka persiapan menghadapi musuh Belanda. Kemudian dengan cepatnya menjalankan aksinya kepada siapa saja yang melewati pos penjagaan pemuda di Talang, baik mereka yang berjalan kaki, naik sepeda, dokar maupun kendaraan bermotor satu persatu diberhentikan dan diperiksa dengan cara tidak teratur bahkan terjadi tindak kekerasan, bila dalam pemeriksaan tersebut dijumpai orang-orang pamongpraja, kepolisian negara maka langsung diseret, dipukuli dan ditahan dengan tuduhan NICA/ kaki tangan Belanda. Dan mulai mengadakan ketentuan, barangsiapa yang berjalan melewati pos penjagaan pemuda mereka harus berhenti dan mengangkat

tangganya menyampaikan salam MERDEKA!. Bila ketentuan tidak ditaati oleh siapapun, ia tidak luput oleh sasaran penganiayaan.

Seperti yang pernah terjadi terhadap diri seorang bernama Rusli, Opsir bengkel kereta api Tegal, ia naik sepeda tidak berhenti dan tidak menyampaikan salam Merdeka, langsung diseret dan digantung ditiang listrik dan dipukuli. Setelah sudah dalam keadaan babak belur, ia baru ditanya mau ikut siapa? Kemudian baru dilepaskan kembali setelah dijawabkan ikut Kutil.

Daerah Talang-lah yang menjadi contoh terkenal selama revolusi sosial di tiga daerah. Pada zaman kolonial Belanda Kecamatan Talang dikelilingi 4 pabrik gula, Pagongan, Pangkah, Kemanglen, dan Ujungrusi, yang praktis memborong menyewa lahan yang tersedia. Rakyat tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam, mencari mata pencaharian lain. Kawasan ini terkenal dengan tukang emas, pengrajin kuningan, dan lain-lain kerajinan logam, seperti pembikinan pisau, gunting, dan suku cadang sepeda.

Sewaktu dalam perjalanan ke selatan untuk menjelaskan pernyataan pangreh praja yang mendukung proklamasi kemerdekaan, dua orang pemimpin perjuangan Tegal, termasuk wakil ketua KNI Tegal dibunuh di talang pada tanggal 4 November. Ada pula yang ditangkap dan dibunuh pada minggu yang sama. Siapa saja yang melewati Talang akan mendapat resiko kehilangan nyawa, demikianlah orang-orang percaya. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Tegal dalam perjalanan kembali ke Jakarta pada pertengahan Desember 1945 menyebut Gerakan ini sebagai Gerakan “Negara Talang”.

Kecamatan Talang terkenal terutama karena Kutil, jagoan rakyat Talang, yang kehidupan dan kematiannya telah dimitoskan oleh sejarah. Anggapan umum di luar daerah Talang, Kutil adalah seorang algojo yang telah membunuh banyak orang, kejam, buas, anarkis, alat PKI, tapi ada juga yang beranggapan bahwa dia adalah agen NICA. Dalam sidang pengadilan Pekalongan, Kutil mengaku telah melakukan banyak, dan menurut pendukungnya hal itu dilakukan demi melindungi teman-temannya di Talang. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman mati melalui proses pengadilan formal di Pekalongan (Su'ud, 2003: 69).

Untuk memahami mengapa terjadi peristiwa gerakan sosial yang terjadi di Kabupaten Tegal pada tahun 1945, kita perlu juga mengetahui sejarah politik daerah tersebut. Pada abad kesembilan belas terjadi aksi protes terhadap tanam paksa (gula) dan beban wajib kerja yang menjadi inti dari sistem tanam paksa Belanda. “Brandal Mas Cilik” di Tegal merupakan pemberontakan petani tahun 1864, dipimpin oleh seorang dukun yang bernama Mas Cilik, yang menyerang pabrik gula dan membunuh pegawai Belanda. Aksi protes itu muncul lagi pada tahun 1926, dengan pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal. Kali ini petani melawan dengan senjata ideologi modern, yaitu komunis. Peristiwa pemberontakan tahun 1926 ini mengakibatkan banyak pemimpin dari Tegal dibuang ke tempat pengasingan Boven Digul di Irian Jaya. Golongan inilah yang muncul kembali memimpin badan-badan perjuangan dan menyusun strategi politik mengubah struktur pemerintahan di Tiga Daerah pada tahun 1945 itu (Lucas, 1989: 3).



Berdasarkan uraian diatas adalah bahan yang unik dan menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang gerakan sosial yang terjadi di tiga daerah khususnya di kabupaten Tegal. Atas dasar tersebut sehingga peneliti mengajukan judul “*Gerakan Sosial di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 1945-1946*”. Pemilihan lokasi penelitian di kecamatan Talang Kabupaten Tegal karena pada saat meletusnya peristiwa tiga daerah, kecamatan Talang merupakan pusat gerakan sosial di kabupaten Tegal dan markas Kutil yang merupakan pemimpin pemberontakan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan Islam, golongan kiri, dan militer selama jalannya gerakan sosial. Yang menarik dalam penelitian ini yaitu, bersatunya umat islam dan golongan kiri bahu-membahu dalam menggulingkan elite birokrat dan pangreh praja di Tegal, seperti pada saat pendaulatan K.H Abu Su’jai yang diangkat oleh Kutil sebagai Bupati Tegal. Militer juga punya kepentingan sendiri, yaitu ingin mengambil alih aset-aset yang dikuasai kaum revolusioner seperti pabrik gula untuk kemudian menukarnya dengan senjata di Singapura. Jadi, militer disini punya peran ganda disatu sisi bertempur menghadapi pasukan sekutu yang diboncengi NICA yang telah mendarat di Semarang, disisi lain militer atau TKR harus meredam gerakan sosial yang terjadi di tiga daerah termasuk di Talang, Kabupaten Tegal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Gerakan Sosial di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana jalannya peristiwa Gerakan Sosial di Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana peran militer dalam meredam Gerakan sosial di Kabupaten Tegal?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang masalah dan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab atau latarbelakang terjadinya Gerakan sosial di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?
2. Untuk mengetahui jalannya Gerakan Sosial di Kabupaten Tegal
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meredam pergolakan sosial yang terjadi di Kabupaten Tegal

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teori
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan sejarah lokal dengan menambah wawasan dan pengetahuan tentang peristiwa Revolusi sosial di kecamatan Talang kabupaten Tegal
  - b. Sebagai referensi dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti
2. Manfaat Praktis
  - a. Dijadikan sebagai syarat untuk mengambil gelar sarjana S-1 di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  - b. Dapat memberikan sumbangsih bagi penulisan sejarah lokal khususnya di Kabupaten Tegal

## **E. KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Definisi Gerakan Sosial**

Menurut Tarrow, gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan dan penguasa. Tarrow melakukan elaborasi terhadap definisi tersebut dengan menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut (a) menyusun aksi mengacau (*disruptive*) melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain dan aturan-aturan budaya tertentu, (b) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (c) berakar dari rasa solidaritas atau identitas kolektif; dan (d) terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial (Klandersman, 2005: 15).

Sartono Kartodirdjo juga menguraikan bahwa gerakan sosial adalah gerakan perjuangan yang dilakukan oleh golongan sosial tertentu melawan eksploitasi ekonomi, sosial, politik, agama, dan kultural, oleh kelompok penekan, apakah itu penguasa atau negara. Termasuk dalam gerakan semacam ini, di antaranya, adalah kaum petani dan buruh.

Sejarah sosial dapat diartikan sebagai sejarah berbagai gerakan sosial, antara lain partai politik, agama, organisasi golongan karya, dan lain sebagainya. Gerakan agama, nasionalis, dan berbagai aliran ideologi juga dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial.

Berdekatan dengan arti tersebut ialah sejarah sosial sebagai sejarah gerakan sosial, antara lain mencakup gerakan serikat buruh, gerakan kaum

sosialis, gerakan kaum nasionalis, gerakan emansipasi wanita, gerakan anti perbudakan, dan lain sebagainya.

Gerakan sosial (*social movement*) sebagai gejala sejarah senantiasa menarik oleh karena di dalamnya terdapat proses dinamis dari kelompok sosial yang dimobilisasi oleh tujuan ideologis, terutama pada fase gerakan itu belum melembaga secara ketat sebagai organisasi formal.

Gerakan sosial dalam sejarah Indonesia mencakup fenomena historis, seperti perbanditan sosial, revitalisasi agama, gerakan Ratu Adil, dan gerakan perang sabil, kesemuanya itu merupakan manifestasi dari usaha kolektif untuk mengadakan atau menolak perubahan kehidupan masyarakat. Selama abad ke-19 dan ke-20 timbullah banyak pergolakan sosial, seperti huru-hara, kerusuhan, berandalan, pemberontakan, terutama didaerah pedesaan, yang disebabkan oleh gerakan-gerakan sosial.

Penetrasi proses westernisasi dalam masyarakat tradisional menimbulkan keretakan sosial berdasarkan sistem-sistem nilai dan akhirnya menciptakan situasi konflik. Reaksi kolektif terhadap penetrasi barat digerakkan melalui saluran kepemimpinan tradisional menjadi organisasi perlawanan terhadap kaum Barat. Kepemimpinan elite religius diperkuat dengan ikatan institusional yaitu perhubungan guru dan murid, pemakaian lambang-lambang religio-magis dan ideologi. Perlawanan diperhebat dengan indoktrinasi perang sabil terhadap penguasa kafir; suasana yang diliputi oleh kegelisahan sosial sangat memudahkan tumbuhnya ide mesianistas dan nativistis, yaitu kedatangan seorang ratu adil yang akan datang membawa kesejahteraan, kemakmuran, ketertiban dan keamanan.

Yang karakteristik bagi gerakan sosial itu adalah seperti kepemimpinan dengan ototritas yang kharismatis, pemakaian alat-alat magis untuk menjamin kekebalan, kunjungan ke makam-makam suci sebelum beraksi, harapan akan kedatangan kerajaan kuno atau seorang Ratu Adil, yang mengakibatkan usia gerakan tersebut menjadi pendek.

Kegelisahan agraris dalam abad ke-19 dan ke-20 yang dimanifestasikan oleh hipertrofi dari pergerakan-pergerakan sosial sosial tampak nyata sekali dari banyaknya pergolakan-pergolakan di pedesaan. Distribusi geografis menunjukkan, bahwa setiap daerah mengenal masa-masanya pergolakan itu sendiri selama periode itu. Ada daerah yang dimana pergolakan sosial merupakan hal yang biasa, seperti di Banten yang terkenal sebagai daerah yang selalu bergejolak, sehingga dapat dikatakan bahwa daerah itu mempunyai tradisi memberontak. Selama bagian pertama abad ke-19 dari tahun ke tahun mengalami kerusuhan dan setiap tiga tahun pemberontakan yang luas (Kartodirjo, 1982: 286).

#### **b. Macam-macam gerakan sosial**

Menjelang Perang dunia II , di Jawa hampir setiap tahun terus menerus timbul huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dsb terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu tepatlah jika disebut pergolakan sosial di Jawa menjadi endemis. Revolusi agraris adalah suatu kegiatan yang ada di daerah pedesaan yang kadang-kadang diwujudkan sebagai serangan yang dahsyat. Pergerakan rakyat itu lazimnya dianggap Kuno karena organisasinya, programnya, strategi dan taktiknya masih terlalu sederhana dan tidak sebanding dengan gerakan sosial modern seperti yang dilancarkan oleh fasisme, komunisme, sosialisme,

komunisme dsb. Sehingga pemberontakan mudah ditindas oleh pemerintah kolonial. Pergerakan itu umumnya sangat pendek umurnya, merupakan pergolakan lokal atau regional dan tidak ada koordinasi satu dengan yang lain, tujuan yang kabur dan partisipan tidak memiliki gambaran bagaimana tata masyarakat dan tata pemerintahan yang akan direalisasikan andaikan perjuangannya mencapai kemenangan.

Pergerakan sosial di Indonesia dikategorikan menjadi sebagai berikut :

- 1) Gerakan Sosial Pertama adalah Perbanditan sosial yang mencakup perampokan, penyamunan dan kegiatan itu bertentangan dengan pihak yang berkuasa atau tata tertib masyarakat. Yang tergabung dalam gerakan gerakan ini adalah unsur mengacau dan termasuk sebagai warga masyarakatnya. Contohnya adalah Gerakan-gerakan dibawah pimpinan Mas Jakaria di Banten dan pemberontakan yang dipimpin oleh bagus Sanda dan Bagus Sadin di Cirebon 1816 (M.L. van Deventer dalam Kartodirdjo, 2013 : 287).
- 2) Gerakan Sosial Kedua adalah gerakan yang memprotes keadaan atau peraturan yang dirasakan tidak adil. Contohnya adalah Gerakan Penduduk banyumas menentang kewajiban untuk bekerja pada bangunan pertahanan di Cilacap pada tahun 1850; pada tahun itu juga petani-petani dari bagian utara Demak secara beramai-ramai pergi ke Semarang untuk menuntut agar pembayaran pajak tanah dapat dilakukan dengan penyeteran padi; pada tahun 1852 di Ngempit, Pasuruan, penduduk merayakan berakhirnya kontrak penanaman tebu; pada tahun berikutnya petani-petani pergi ke Surabaya untuk menolak penanaman tembakau (E. de Waal dalam Kartodirdjo, 2013 : 288).

- 3) Gerakan sosial Ketiga adalah gerakan yang sifatnya revivalistis yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya. Bukti nyata adalah banyak didirikan masjid dan pesantren; di samping itu ada pertumbuhan pesat dari tarekat-tarekat, tarekat Kadiriyah terutama di Banten, tarekat Naksibandiyah di Priyangan Jawa barat, tarekat Syatariyah di Banyumas (Kartodirdjo, 2013 : 289)
- 4) Gerakan Sosial Keempat meliputi gerakan- gerakan yang bercorak nativistis, tujuannya menegakkan kembali kerajaan kuno , umpamanya Kesultanan Banten seperti dalam Gerakan Cikandi Udik 1845, kerajaan Sunda pada gerakan Raksa Praja di Priyangan pada tahun 1841, dan kerajaan Jawa pada gerakan Nurkhaim pad tahun 1871 (Kartodirdjo, 2013 : 289).
- 5) Golongan Kelima terdiri atas gerakan- gerakan yang mesianistis yaitu yang membuat yaitu memuat harapan akan kedatangan Ratu Adil atau Imam Mahdi yang memuat harapan akan kedatangan Ratu Adil atau Imam Mahdi. Seperti Peristiwa Cilegon, Peristiwa Srikaton, peristiwa Jasmani ketiganya terjadi pada tahun 1988, termasuk pergerakan mesianistis (Kartodirdjo, 2013 : 289).
- 6) Gerakan Sosial Keenam ialah yang dijiwai oleh semangat perang sabil seperti pada peristiwa Bandung 1885, peristiwa Ciomas pada 1886, peristiwa Pak Jebrak di Brangkal pada tahun 1919; pada tahun itu juga terjadi peristiwa Cimareme di bawah pimpinan Haji Hasan (Kartodirdjo, 2013: 289).

Gerakan sosial yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah termasuk dalam gerakan sosial yang pertama, yaitu perbanditan sosial yang mencakup perampokan, penyamunan dan kegiatan itu bertentangan dengan pihak

yang berkuasa atau tata tertib masyarakat. Yang tergabung dalam gerakan gerakan ini adalah unsur mengacau dan termasuk sebagai warga masyarakatnya. Gerakan sosial yang dipimpin oleh Kutil yang berpusat di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah gerakan yang bertujuan untuk mengacau dan berusaha untuk menggantikan para pejabat pemerintahan daerah bekas peninggalan Jepang, dari mulai Lurah, Camat, Wedana, Bupati dan Residen dengan latar belakang untuk merebut kekuasaan pemerintahan RI yang sah, dengan jalan kekerasan menggunakan massa rakyat.

### c. **Faktor Pendorong**

Gerakan sosial pada umumnya dibedakan dari kegiatan kolektif yang terorganisasikan dalam lembaga-lembaga yang telah mantap strukturnya, antara lain partai politik, agama, organisasi golongan karya, dan lain sebagainya. Strukturasi masih embrional; jadi, masih ada keluwesan dalam arah dan bentuk pertumbuhannya. Struktur kekuasaannya pun juga belum berhierarki ketat (Kartodirjo, 1982:100).

Adapun Faktor Pendorong terjadinya gerakan sosial menurut Smelser adalah :

- 1) *Structural Conduciveness* yaitu adanya suatu struktur sosial yang mendukung lahirnya suatu gerakan.
- 2) *Structural Strain* yaitu adanya ketegangan struktural seperti adanya ancaman tertentu dan privasi ekonomi.
- 3) *The Spread of Generalized belief*, Tersebarnya keyakinan umum yang dianut, ini berarti situasi harus dibuat bermakna bagi pelaku potensial, sumber ketegangan dan cara menghadapinya harus diidentifikasi.



- 4) *The precipitating* , yaitu adanya factor pencetus berupa peristiwa atau situasi tertentu.
- 5) *Mobilization into action* yaitu mobilisasi untuk bertindak dalam situasi ini peran seseorang sangat menentukan situasi bisa berkembang menjadi kepanikan, permusuhan, bahkan revolusi.
- 6) *The operation of social control* yaitu pengoperasian kontrol sosial atau factor penentu yang bisa mencegah, mengganggu, atau menghalangi gejolak-gejolak itu (Smelser dalam Jurdi, 2010 : 143).

**d. Ciri-ciri Gerakan Sosial**

Berikut Ciri- Ciri Pergerakan Sosial :

- a. Pola Kepemimpinan ada di tangan elite kultural yang mengetahui tentang tradisi, baik yang tertulis maupun lisan
- b. Segi Mesianistis. Pemimpin sering diidentifikasi sebagai mesias atau utusan atau Ratu adil
- c. Adanya harapan Milenaristis seperti datangnya zaman keemasan yang tidak mengenal penderitaan rakyat , bebas dari pajak dll.
- d. Segi Nativistis. Ini menunjukkan usaha untuk menghidupkan kembali atau mempertahankan berbagai segi dari kebudayaan asli dalam perkembangannya beberapa lambang tradisional mendapat arti politis seperti kerajaan kuno (dalam Kartodirdjo, 2013 : 80-82).

## 1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan topik yang akan dilakukan peneliti adalah: Penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Aman mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul "*Kedudukan Ulama, Umat Islam, Dan Kemunculan Haluan Kiri Dalam Revolusi Sosial Di Kabupaten Brebes 1945*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi ulama dan umat Islam dalam dalam revolusi sosial di Kabupaten Brebes tahun 1945, kemunculan haluan kiri yang menyertai revolusi sosial tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ulama dan umat Islam di Kabupaten Brebes mempunyai posisi yang strategis dan menjadi pengarah yang baik jalannya revolusi. Sementara kemunculan kelompok kiri dalam revolusi sosial menjadi penyulut revolusi itu sendiri dan menampilkan pergerakan bahwa seolah-olah kelompok sosial inilah yang memiliki peranan penting dalam melawan penindasan dan perlawanan terhadap status quo. Hal inilah yang selanjutnya memicu permusuhan antara ulama dan kelompok kiri.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti lakukan adalah lokasi dan jalannya peristiwa dalam revolusi. Peneliti dalam penelitian ini memiliki perbedaan terhadap jalannya peristiwa, pada penelitian sebelumnya terjadinya revolusi di Brebes berjalan dengan lunak tanpa kekerasan, sedangkan jalannya revolusi sosial di Tegal berlangsung dengan adanya peristiwa pembantaian dan pembunuhan massal. Lokasi penelitian yang digunakan Aman adalah di Kabupaten Brebes, sedangkan lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Penelitian yang dilakukan oleh Laela Khikmiyah pada tahun 2007, mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dengan judul “*Kutil Tokoh Lokal Dalam Revolusi Sosial Di Tegal Tahun 1945-1946*”. Penelitian ini bertujuan : Ingin mengetahui bagaimana Latar belakang kehidupan Kutil dan Ingin mengetahui sejauh mana peranan Kutil dalam menggerakkan Revolusi Sosial. Berdasar hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Latar belakang kehidupan Kutil terutama masa kecilnya yang berasal asli dari Madura, seperti yang dinyatakan Kuntowijoyo orang Madura adalah suku bangsa jawa yang mempunyai adat-istiadat yang keras, kasar dalam tutur katanya, tetapi juga merupakan pekerja yang bersungguh-sungguh dan suka berterus terang sifat itulah sangat mempengaruhi watak dan pandangannya. Peranan Kutil dalam menggerakkan revolusi sosial diantaranya Munculnya dia sebagai seorang tokoh yang mempunyai pengaruh sangat besar. Caranya menarik simpati dan bentuk kepemimpinannya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam peristiwa tiga daerah. Kutil adalah orang yang dijadikan tokoh sentral yang memimpin “aksi pendombangan” di wilayah Tegal.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada fokus penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan tentang biografi dan peranan seorang kutil yang merupakan pemimpin pemberontakan di Kabupaten Tegal, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti lebih menekankan pada jalannya peristiwa revolusi dan peranan islam, golongan kiri & militer dalam jalannya peristiwa revolusi sosial di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan beberapa judul penelitian di atas memberikan gambaran bahwa gerakan-gerakan sosial terjadi karena ketimpangan sosial, kebobrokan ekonomi, penindasan dan sebagai aksi balas dendam terhadap para elite birokrat dan pangreh praja atas tindakan-tindakan mereka selama masa penjajahan Belanda maupun pendudukan Jepang.

Penelitian yang mengkaji tentang protes sosial telah banyak dijumpai, namun demikian penelitian tersebut berbeda dalam konteks regional ataupun dalam konteks isi dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibahas peran Islam, golongan kiri dan militer didalamnya, masing-masing kubu atau golongan punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang menarik dalam penelitian ini adalah bersatunya golongan Islam dan kiri dalam menggulingkan elite birokrat di Tegal. Militer disini juga punya peran ganda, disatu sisi bertempur menghadapi pasukan sekutu yang diboncengi NICA yang telah mendarat di Semarang, disisi lain militer atau TKR harus meredam pergolakan yang terjadi di tiga daerah termasuk di Talang, Kabupaten Tegal.

## **F. Landasan Teori dan Pendekatan**

### **1. Kajian Teori**

#### **a. Teori Mobilisasi Sumber Daya**

Teori mobilisasi sumberdaya berangkat dari asumsi bahwa gerakan sosial merupakan sejumlah aksi kolektif yang rasional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tersingkir untuk menyatakan kepentingan mereka. Aksi kolektif merupakan cara atau sarana untuk mencapai tujuan; cara yang dipilih diantara berbagai *repertoire* yang tersedia pada masyarakat. Dalam mengkaji gerakan-gerakan sosial, penganut teori-teori ini berfokus pada kerugian dan manfaat dalam berpartisipasi (pada tingkat individual), ketersediaan sumber daya, terutama di kalangan organisasi-organisasi dan jaringan-jaringan sosial asli (di tingkat masyarakat), dan keberadaan atau perubahan peluang-peluang politis (di tingkat politik). Teori ini mementingkan kajian terhadap tipe dan proporsi menyangkut sumber-sumber daya yang dihimpun oleh suatu gerakan sosial serta efektivitas strategi dan taktik mobilisasi mereka. Teori ini juga menganggap penting tipe keterlibatan orang-orang di dalam gerakan, dengan membedakan penganut (anggota tetap dan peserta), konstituensi (sumber dari sumber daya), dan para pencari keuntungan (*beneficiaries*). (Klandersmen, 2005: 383)

Teori ini menjelaskan bahwa kemampuan atau kepemilikan pada akses sumberdaya yang ada memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan sosial. Asumsi teori ini adalah masyarakat selalu mengalami ketidakpuasan akan perkembangan yang terjadi. Kondisi ini memunculkan terjadinya sebuah gerakan sosial.

Keberhasilannya pun sangat ditentukan oleh kecekatan aktor-aktor gerakan untuk mengorganisasi kekecewaan, meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, sekaligus memanfaatkan jaringan-jaringan solidaritas sosial yang ada dan membagi insentif untuk mencapai konsensus bersama.

#### **b. Teori Konflik Sosial**

Istilah konflik sosial mengadung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser, mulai mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber sumber pertentangan di netralisir atau dilangsungkan.

Coser mulai dengan mendefinisikan konflik social sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. Perhatian Coser berkaitan dengan fungsi dan bukan dengan disfungsinya konflik sosial. Dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa konsekwensi konflik sosial tersebut akan mengarah pada peningkatan dan bukan kemerosotan, adaptasi atau penyesuaian baik dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan. Coser menekankan pada sisi konflik yang positif yakni bagaimana konflik itu dapat member sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi dan system social. Coser menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat

disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Ia menyatakan bahwa konflik sosial internal yang berhubungan dengan tujuan, nilai-nilai dan kepentingan tidak akan bertentangan dengan asumsi dasar di mana hubungan itu didasarkan pada kecenderungan fungsional yang positif bagi struktur sosial tersebut.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Konflik juga memiliki kaitan yang erat dengan struktur dan juga konsensus. Coser mengungkapkan komitmennya pada kemungkinan menyatukan pendekatan teori fungsional struktural dan teori konflik. Coser mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, suatu proses yang ditonjolkan oleh kaum fungsional struktural, tetapi dia juga menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser sering kali disebut teori fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Lewis Coser juga memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi dari konflik. Bahwa uraian Coser terhadap konflik bersifat fungsional dan terarah kepada pengintegrasian teori konflik dan teori fungsionalisme struktural (Margaret, 2003: 46).



## **1. Pendekatan**

Selain teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian hendaknya memiliki sebuah pendekatan yang relevan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional mempunyai nilai heuristik yang tinggi, dengan konsep dari ilmu-ilmu sosial fakta-fakta dapat distrukturalisasikan dan berbagai aspek aspek dari fenomena sejarah dapat dirumuskan, berbagai teori dapat membantu untuk menentukan struktur metodologi sejarah (Kartodirdjo, 1992: 95). Pendekatan multidimensional dalam penelitian kali ini menggunakan ilmu bantu antara lain, sosiologi, politik dan psikologi sosial.

Menurut Kartodirdjo (1992: 4) pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menepohong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, umpamanya golongan atau komunitas sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungannya dengan kelompok lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan sebagainya. Pendekatan sosial digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat sebab-sebab atau latarbelakang terjadinya gerakan sosial di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau. Politik dan sejarah merupakan satu keping mata uang yang tidak terpisahkan (Priyadi, 2015: 131).

Pendekatan politik merupakan ekstrapolasi aspek politik masyarakat yang

mencakup hubungan kekuasaan, struktur kekuasaan, kepemimpinan, jenis-jenis otoritas, dan lain sebagainya (Kartodirdjo,1992:99). Pendekatan politik yang difokuskan kepada pusat, simbol, dan hierarki kekuasaan pada negara-negara-negara klasik di Indonesia merupakan kajian yang juga berbau antropologi (Gesick dalam Priyadi,2015:133). Pendekatan politik digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat bagaimana peran seorang pemimpin pemberontakan yaitu Kutil dalam menggerakkan massa selama peristiwa tiga daerah khususnya di Kecamatan Talang kabupaten Tegal. Pendekatan politik juga digunakan untuk mengkaji kepentingan-kepentingan dari berbagai golongan yang ada selama revolusi sosial berlangsung. Untuk memahami mengapa terjadi peristiwa revolusi sosial pada tahun 1945, kita juga perlu mengetahui sejarah politik daerah tersebut. Pada abad kesembilan belas terjadi aksi protes sosial terhadap tanam paksa (gula) dan beban wajib kerja yang menjadi inti dari sistem tanam paksa Belanda.

Menurut Kartodirdjo (dalam priyadi,2015: 129), perilaku kolektif menjadi objek psikologi sosial yang tampak pada peristiwa sejarah, yaitu (1) massa mengamuk pada peristiwa huru-hara, (2) timbulnya gerakan sosial, (3) masa pergolakan penuh kekacauan, rakyat bertindak dalam gerombolan, (4) semangat radikal yang cenderung mengarah pada tindakan kekerasan dan (5) keresahan sosial akibat masyarakat telah kehilangan orientasi nilai budaya atau perubahan kebudayaan.

Ada kecenderungan bahwa perilaku kolektif itu terbentuk oleh adanya keberanian sekelompok orang yang digerakkan oleh provokator pelaku sejarah

yang memiliki kepribadian individu yang kuat. Ketika orang sendirian cenderung merasa takut, tetapi ketika orang mempunyai teman dan jumlahnya banyak akan timbul keberanian. Psikologi sosial disini digunakan untuk mengkaji partisipasi individu dalam sebuah gerakan sosial di Talang, Kabupaten Tegal.

## **G. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah suatu cara seorang sejarawan mendekati objek penelitiannya dengan langkah-langkah yang terstruktur sehingga akan mempermudah dalam pemerolehan data sejarah. Dalam penelitian sejarah, data berkedudukan sangat penting sebab tanpa data, sejarah tidak mungkin ditulis (Priyadi, 2013: 111).

Adapun proses metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu: Heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi), interpretasi, historiografi.

### **1. Heuristik**

Heuristik adalah sebuah tahapan untuk mencari dan menemukan sumber yang memuat data dan informasi lisan mengenai masalah yang diangkat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disesuaikan dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 1995: 94). Data sejarah tidak selalu tersedia dengan mudah sehingga untuk memperolehnya harus bekerja keras mencari data lapangan, khususnya artifact, baik pada situs-situs sejarah maupun lembaga museum, atau mencari data sejarah lisan yang menyangkut para pelaku dan penyaksi sejarah, atau dokumen yang tersimpan pada lembaga, baik kearsipan

maupun arsip perorangan, atau naskah-naskah yang juga tersimpan pada lembaga, baik perpustakaan maupun perorangan (Priyadi, 2003:112).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik antara lain:

**a. Studi Kepustakaan**

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan metode Kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan untuk mencari koleksi yang ada di perpustakaan dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut kemudian diseleksi dan diambil yang mempunyai kesesuaian dengan topik penelitian.

Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut yang berupa buku-buku, dokumen dan bebrapa literatur. Peneliti mendatangi tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2. Perpustakaan Prodi Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Perpustakaan “Mr. Besar Martokoesomo” Kota Tegal
4. Perpustakaan “Soekarno-Hatta” Kabupaten Tegal
5. Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES Semarang

**b. Studi Kearsipan**

Sumber-sumber arsip diperoleh dari Museum Mandala Bakti Kodam VII Diponegoro Semarang dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah. Khazanah arsip yang sesuai dengan tema penelitian penulis ialah koleksi arsip tentang peristiwa tiga daerah khususnya di daerah Tegal. Dalam melakukan penelusuran arsip dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, peneliti menemukan arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa tiga daerah terutama

dalam gerakannya di Tegal. Tetapi dalam arsip yang peneliti temukan dalam museum mandala Bhakti Semarang lebih banyak dari segi sudut pandang militer, yaitu tentang bagaimana kedudukan militer dan peranannya dalam menumpas pemberontakan tiga daerah di Karesidenan Pekalongan. Kendala dalam pengumpulan sumber berupa arsip dan dokumen disini adalah karena arsip-arsip tersebut sudah berusia puluhan tahun maka tulisan dan hurufnya agak kabur dan susah dibaca.

## **2. Kritik (Verifikasi)**

Verifikasi pada penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern untuk mencari otentisitas atau keotentikan (keaslian) sumber dan kritik intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebisaan untuk dipercaya) atau tidak. (Priyadi, 2011:75)

Kritik ekstern dilakukan oleh penulis untuk memastikan apakah sumber-sumber tertulis yang diperoleh merupakan dokumen atau sumber tertulis yang sah berdasarkan bahan dari dokumen atau sumber tertulis tersebut, seperti dari segi kertas, tinta, dan bentuk tulisannya. Kritik ekstern dari sumber internet dilakukan dengan mengamati alamat situs lantas mengamati tujuan dari pembuatan situs tersebut, apakah situs itu membahas tentang masalah ilmiah atau hiburan. Kritik terhadap sumber tak tertulis dilakukan dengan mencari tahu apa peranan nara sumber dalam peristiwa yang dikaji penulis, serta identitas pribadinya seperti latar belakang pendidikan.

Kritik intern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas suatu teks. Kredibilitas ini berupa fakta-fakta yang terkandung di dalamnya. Fakta itu

menurut menurut Gottschalk dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarkan secara langsung dan tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukumhukum metode sejarah (Kuntowijoyo, 2003:96). Kritik intern dilakukan dengan mengkroscekkan bukti satu dengan yang lainnya, dalam hal ini penulis membandingkan keterangan dari para pelaku sejarah dengan arsip dan dokumen yang penulis temukan serta memilah antara keterangan yang bersifat obyektif dan subyektif.

### **3. Interpretasi**

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Tugas dari interpretasi adalah memberikan penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau. Fakta-fakta sejarah dalam kaitannya dengan tugas atau fungsi rekonstruksi adalah hanya sebagai sebagian bukti di masa sekarang bahwa realitas masa lampau pernah ada dan pernah terjadi. (Daliman, 2012: 83)

Dalam menginterpretasikan fakta sejarah, sejarawan berusaha mendeskripsikan secara detail fakta-fakta yang disebut analisis. Deskripsi ini dilakukan agar fakta-fakta yang sudah diperoleh akan menampilkan jaringan antarfakta sehingga fakta itu saling bersinergi (Priyadi, 2013: 121).

Bukti-bukti sejarah yang telah terkumpul dan telah diseleksi berdasarkan langkah-langkah di atas, belum dapat mengungkap suatu kebenaran yang dicari. Hal itu disebabkan oleh saling lepasnya antara bukti yang satu dengan lainnya. Perlu dilakukan penelitian untuk memahami maksud dari masing-masing

bukti, kemudian sesudah itu dicocokkan dan dipadukan dalam suatu rangkaian yang saling hubung sehingga membawa satu kesatuan yang harmonis. Interpretasi ini yang menjadi tahap penafsiran sumber-sumber sejarah agar menjadi suatu kisah yang baik. Dalam langkah ini peneliti membandingkan sumber-sumber yang masuk ke peneliti baik itu sumber primer ataupun sekunder. Setelah membandingkan peneliti memberi tanggapan atau kesimpulan mengenai sumber-sumber tersebut.

#### **4. Historiografi**

Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk rekonstruksi sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus menyadari bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur gaya bahasanya. Peneliti sejarah harus menjadikan orang lain dapat mengerti pokok-pokok pikiran yang dihadirkan penulisnya. Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan sehingga dapat menjadi karya tulis ilmiah yang sesuai dengan ketentuan keilmuan (Kuntowijoyo, 1995: 102).

Pada tahap penulisan, peneliti menyajikan laporan hasil penelitian dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah-masalah yang telah diajukan. Pada hakikatnya, penyajian historiografi meliputi (1) pengantar, (2) hasil penelitian, dan (3) simpulan (Priyadi, 2001: 92). Pada langkah ini peneliti menuliskan hasil yang didapat dari penelitiannya. Penulisan historiografi dalam penelitian ini



berusaha menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu meliputi latar belakang terjadinya gerakan sosial di kecamatan Talang kabupaten Tegal, jalannya peristiwa gerakan sosial dan peranan pemerintah dalam meredam pergolakan sosial di kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

## **H. Sistematika Penyajian**

Penyusunan yang dilakukan dalam sebuah penelitian secara ilmiah harus sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah agar penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dapat lebih sistematis dan terinci dengan baik. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini peneliti membagi ke dalam beberapa bagian.

Bab I pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi latar belakang atau alasan mengapa peneliti mengambil penelitian ini, rumusan masalah yang berisi mengenai poin-poin apa saja yang akan diteliti oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang berisi metode atau cara peneliti dalam melakukan penelitian, landasan teori dan pendekatan yang berisi dasar atau pondasi teori yang digunakan untuk mendukung keabsahan penelitian serta pendekatan apa yang cocok untuk penelitian ini, sistematika penulisan yang berisi bagian-bagian yang akan diteliti.

Bab II, berisi tentang kondisi wilayah dan gambaran umum mengenai Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pada bab ini menerangkan mengenai keadaan Kabupaten Tegal, mulai dari letak geografis, kondisi sosial dan struktur masyarakatnya. Pada bab ini juga diterangkan sedikit mengenai keadaan pada

masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dan situasi politik awal kemerdekaan di Tegal.

Bab III, pada bab ini menerangkan tentang kemunculan militer khususnya BKR/TKR Tegal dan badan-badan perjuangan selama jalannya gerakan sosial. Pada bab ini juga menerangkan peranan Kutil, pemimpin pemberontakan dalam menggerakkan dan memobilisasi massa gerakan sosial tersebut.

Bab IV, berisi tentang puncak peristiwa gerakan sosial dan sikap pemerintah pusat terhadap peristiwa tiga daerah yang terjadi di karesidenan Pekalongan khususnya di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan perannya dalam meredam pergolakan dengan penangkapan tokoh-tokoh dalam gerakan sosial di Talang.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.

